BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Romney dan Steinbart (2015:226) pengendalian internal *(internal control)* adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Tujuan- tujuan tersebut yaitu: mengamankan aset, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar, memberikan informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mendorong dan memperbaiki efesiensi operasional, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah di tentukan serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal serupa dikemukakan oleh COSO (2018:18) yang mengemukakan definisi pengendalian intern adalah *process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regrding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance*.

Sedangkan menurut Hery (2014:188) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan)

hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Rama dan Jones (2008:132) juga menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efesiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran pengendalian internal pada penelitian ini menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh Moeller (2009:50) yaitu sebagai berikut: *the three dimension of all internal controls: (1) realbility of financial reporting, (2) compliance with applicable laws and regulation, (3) effectiveness and effeciency of operations*.

Wittayapoom dan Limsuwan (2012:110), efektivitas pengendalian internal menciptakan keandalan pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar pada pasar modal Thailand. Menurut Reimers (2007:45) pelaporan keuangan adalah kegiatan menyediakan dan menyajikan informasi keuangan *(preparing and presenting financial information)*. Informasi yang dilaporkan meliputi empat laporan (laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas) dan catatan atas laporan keuangan

Selanjutnya Gibson (2009:5) mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan dan bisnis ekonomi. Serupa dengan definisi diatas Sedangkan Choi (1973) dalam Jaffar *et al.* (2007:20) menyatakan pelaporan informasi keuangan sebagai publikasi dari informasi ekonomi yang berkaitan dengan bisnis (kuantitatif atau non kuantitatif), yang dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Kualitas pelaporan keuangan didefinisikan sebagai pelaporan yang mampu menyediakan informasi keuangan yang penuh dan transparan dan tidak didesain untuk memanipulasi dan menyesatkan pengguna (Kangarlouei *et al.*, 2011:1165).

Epstein, Eva, dan Jermakowicz dalam IASB dan FASB menyebutkan ada beberapa karakteristik/dimensi pelaporan keuangan: (1) Informasi yang relevan adalah yang memiliki nilai prediksi, nilai konfirmasi atau keduanya. (2) Representasi yang setia menyiratkan bahwa informasi keuangan yang berguna bagi keputusan mewakili fenomena ekonomi. Peningkatan karakteristik kualitatif untuk membantu pengguna membedakan informasi yang lebih bermanfaat dari informasi yang kurang bermanfaat. (3) Ketepatan waktu yaitu bahwa informasi tersebut diberikan ketika masih berguna untuk pengambilan keputusan. (4) Keterbandingan mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan dalam - dan perbedaan antara - dua set fenomena ekonomi. Konsistensi (penggunaan kebijakan dan prosedur akuntansi yang sama dalam suatu entitas dari periode ke periode, atau dalam periode tunggal lintas entitas). (5) Verifikasi membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi mewakili fenomena ekonomi yang dimaksudkan. (6) Pemahaman yang memungkinkan

pengguna yang memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang masuk akal dan kegiatan keuangan dan pelaporan keuangan, yang menerapkan ketekunan informasi yang wajar untuk dipahami untuk mendapatkan wawasan tentang posisi keuangan dan hasil pelaporan entitas operasi.

Fenomena pelaporan keuangan pertama adalah dalam lingkup lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saat ini masih didapati laporan keuangan yang buruk. Pudjiato (2010) selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 209 pemerintah daerah atau setara dengan 40 persen dari 524 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang didapati memiliki laporan keuangannya buruk. Terdapat dua masalah utama yang menyebabkan pelaporan keuangan daerah masih buruk. Masalah pertama, yaitu sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan daerah pada sebagian besar pemerintahan daerah tidak ditangani oleh tenaga profesional. Masalah kedua, yaitu pencatatan aset daerah yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pasalnya salah satu penyebab rusaknya neraca daerah adalah akibat aset-aset yang tidak dicatat dengan baik.

Permasalahan pelaporan keuangan yang kedua adalah mengenai sistem pelaporan keuangan daerah tidak efisien dari sisi waktu maupun anggaran. Fauzi (2011) selaku Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa buruknya sistem pengendalian intern yang belum berfungsi secara optimal menjadi salah satu penyebab terbesar atas buruknya pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Serupa dengan permasalahan diatas Mardiasmo (2011) selaku Ketua Dewan Pengurus Nasional,Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menyatakan bahwa pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang memiliki keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting.

Fenomena pelaporan keuangan berikutnya adalah ditemukan belasan ribu permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Aziz (2016) selaku Ketua BPK menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2015 kepada DPR RI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan belasan ribu permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dikarenakan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah, beliau menjabarkan, objek pemeriksaan yang dilakukan meliputi 666 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 117 objek pemerintah pusat, 518 objek dalam pemerintah daerah, dan 31 objek dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan usaha lainnya. Selain itu, berdasarkan jenis pemeriksaa terdiri atas 607 pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 10.154 laporan yang mencakup 15.434 permasalahan.

Fenomena terakhir mengenai pelaporan keuangan adalah negara mengalami kerugian lebih dari Rp 221,8 triliun dari APBN P 2015. Soetjipto (2016) selaku Sekjen Fitra, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, menyatakan bahwa kerugian ini diduga disebabkan oleh buruknya aspek pencatatan keuangan dan belum disiplinnya sistem penegakan penerimaan sanksi oleh negara. Beliau mengatakan kerugian sebesar Rp 221,8 triliun merupakan 12 persen dari besaran APBN P 2015 yang mencapai angka sebesar Rp 1.800 triliun. Angka tersebut belum merupakan hasil akumulasi audit keseluruhan dari lembaga dan kementerian negara, beliau menjelaskan, salah satu sumber kerugian negara diduga disebabkan karena buruknya perencanaan keuangan saat pembelanjaan. Sistem perencanaan yang buruk meliputi teknis administrasi, kesalahan pencatatan, alokasi penganggaran yang tidak tepat dan sebagainya. Aspek ini menyumbang kerugian sebesar Rp 166,9 triliun. Kerugian selanjutnya disebabkan karena belum disiplinnya penegakan negara terhadap penerimaan anggaran dari sejumlah sanksi.

Karena banyaknya masalah yang di temukan dalam pelaporan keuangan di Indonesia maka Kementrian Keuangan menggelar Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Harjowiryono (2018) selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa Rakernas ini diadakan dalam rangka untuk terus meningkatkan akuntabilitas bersama sehingga menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dapat terlaksana. Beliau juga berpendapat bahwa selain evaluasi, rakernas ini juga membawa seluruh Kementerian, Lembaga atau Instansi hingga pemerintahan daerah untuk membicarakan bersama akan tantangan

yang dihadapi ke depan. Tantangan itupun juga tidak lepas dari prinsip pemerintahan yang baik, supaya apapun yang dihadapi pemerintah baik dalam skala domestik maupun global dapat dilawan dan menjaga akuntabilitas setiap kementerian, lembaga maupun instansi dalam jalur yang benar.

Dari fenomena-fenomena di atas, dapat diketahui bahwa kualitas pencatatan laporan keuangan saat ini di indonesia masih buruk, yang berarti pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia juga buruk. Menurut Jonas dan Blanchet (2000) mendefinisikan kualitas pelaporan keuangan sebagai dua prosedur untuk kebutuhan pengguna dan perlindungan prosedur pertama untuk investor didasarkan pada kebutuhan pengguna dan kualifikasi yang ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat laporan bagi kedua pengguna yang menekankan pada perlindungan investor dan kualitas yang didefinisikan sebagai pengungkapan yang adil dan penuh bagi pemegang saham.

Dalam penelitian sebelumnya Indriasih dan Koeswayo (2014) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal pemerintah berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan. Begitu juga Riany, Kristian, dan Rapina (2016) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada tempat dan waktu penelitiannya. Penelitian ini mengambil tempat di kota Bandung dan Sekitarnya serta pengambilan data dilakukan pada tahun 2019. Persamaan penelitian

ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada teknik dan pengukuran yang digunakan dalam pengambilan data.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sabagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai nilai tambah bagi kalangan akademik dan dapat digunakan sebagai acuan untuk perkembangan penelitian berikutnya bagi akademisi yang berminat untuk mendalaminya.

2. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan serta pertimbangan bagi pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan, pengelolaan keuangan khususnya bagi bagian akuntansi dalam melaksanakan kewajiban dalam perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya.